

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdurrahman Fatoni, 2011. *“Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi”*, Rineka Cipta Jakarta.
- Amiruddin, 2006. *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, Raja Grafindo Persada.
- Arie Sukanti Hutagalung, 2003, *Konsepsi Yang Mendasari Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- Arie Sukanti Hutagalung, 2005. *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia.
- Bambang Waluyo, 2002. *“Penelitian Hukum Dalam Praktek”*. Sinar Grafika; Jakarta.
- Bernhard Limbong, 2012, *Konflik Pertanahan*, Pustaka Margaretha, Jakarta
- Boedi Harsono, 2008. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan, Isi dan Pelaksanaannya, Edisi Revisi Cetakan Keduabelas*, Jakarta : Djambatan.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003 *“Metodologi Penelitian”*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Gulo, 2002 *“Metodologi Penelitian”*, Grasindo, Jakarta
- Hasan Wargakusumah, *Hukum Agraria I Buku Panduan Mahasiswa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat : Sketsa Asas, Cetakan Kelima*, Liberty, Yogyakarta.
- Maria S.W. Sumarjono, 2001, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta.
- Muchsin, et.al, 2010, *Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah* , Refika Aditama, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Prof. Boedi Harsono. 1997, *Hukum Agraria Indonesia-Sejarah Pembentukan Undang-Undang pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Saptosih Ismiati, 2010. *KDRT dan HAM*, Deepublish, Yogyakarta.

- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Suhendra, 2011, *Analisa Terhadap Hak Keperdataan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sutrisno Hadi, 2002 “*Metodologi Reserch*”, Andi Ofset, Edisi Refisi, Yogyakarta
- Urip Santoso, 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- Urip Santoso, 2013, *Hukum Agraria*, Kencana, Jakarta.
- Winahyu Erwiningsih, 2009, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Cetakan Pertama*, Total Media, Yogyakarta.

B. Skripsi/Disertasi dan Jurnal

- Adam, C. K., Walpa, J. A., & Octavia, V. (2020). *Pertanggungjawaban Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Hilangnya Hak Atas Tanah Milik Warga Masyarakat Yang Terkena Abrasi di Wilayah Kabupaten Brebes Jawa Tengah*. Cepalo, 4(2), 129-142.
- Dwiky Septi Julian Fransiska, 2022. “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Dalam Sertifikat Ganda (Overlapping) Akibat Ulah Mafia Tanah Di Kecamatan Pagedangan (Studi Putusan Nomor 471/Pid/2020/PT.DKI)*”. Skripsi Syariah dan Hukum, UIN Syarifhidayatullah Jakarta.
- Harris, M., Lubis, M. Y., Saidin, O. K., & Zaidar, Z. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Sengketa Batas Tanah Dengan Jiran Tetangga (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor: 3495/K/Pdt/2016). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 4(4), 1024-1050.
- Kusno and Ade Parlaungan Nasution, *Penyeluhan hukum Manfaat Pentingnya Pendaftaran Tanah Bagi Masyarakat Desa Hasang*, *Journal Of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2011): 1689-1699.
- Kuswanto, “*Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Dalam Kasus Tumpang Tindih Kepemilikan Atas Sebidang Tanah Di Badan Pertanahan Nasional/ART Kabupaten Kudus*”. *Jurnal Akta* Vol. 4. No. 1, Maret 2017: 71-74.

Lisa Wulandari, 2022. “*Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Terhadap Jual Beli Hak Milik Atas Tanah* (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor Perkara 372/Pdt.G/2020/PN Sng)”. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Rey Delvi Wahyuni “*Pelayanan Penerbitan Sertifikat Tanah hak Milik Perorangan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil*”. Skripsi Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional